

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak utama untuk setiap individu, termasuk bagi anak-anak dengan disabilitas. Pemerintah Indonesia telah berupaya mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif melalui berbagai kebijakan, seperti Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai system Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Perrmendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang mempunyai Kelainan dan atau kemampuan Kecerdasan dan Bakat Istimewa. Kebijakan ini bertujuan untuk menyampaikan kesempatan yang sama bagi semua siswa dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi.

Penerimaan siswa disabilitas di lingkungan sekolah sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan sekolah, sikap guru dan siswa lain, serta dukungan dari orang tua. Selain itu, adaptasi siswa disabilitas dalam lingkungan sekolah juga menjadi aspek penting dalam memastikan keberhasilan pendidikan inklusif. Adaptasi ini mencakup aspek akademik, sosial, dan psikologis yang berperan dalam keberlangsungan proses pembelajaran mereka. Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melaporkan bahwa terdapat sekitar 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, namun hanya 18% di antaranya yang telah mendapatkan layanan pendidikan. Sementara itu, hasil Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 3,3% anak berusia 5-17 tahun di Indonesia mengalami disabilitas. Data tersebut mengindikasikan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus atau anak inklusi di Indonesia cukup signifikan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi siswa disabilitas di SMA Negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi semua peserta didik. Selain itu,

Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif mengatur hak siswa berkebutuhan khusus untuk mengakses sekolah reguler dengan sistem pendidikan inklusif. Lebih lanjut, dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang PPDB Tahun 2024, pemerintah memastikan bahwa sekolah negeri wajib menyediakan kuota bagi siswa dari kelompok disabilitas dan memberikan fasilitas yang sesuai untuk menunjang pembelajaran mereka.<sup>1</sup>

Dalam buku Allison C. Carey menjelaskan bahwa sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga merupakan institusi sosial yang berperan dalam menentukan siapa yang dianggap “normal” dan siapa yang dianggap “berbeda”. Dalam praktiknya, sekolah sering kali membangun standar tertentu mengenai kemampuan, kemandirian, dan cara belajar siswa. Akibatnya, siswa yang tidak sesuai dengan standar tersebut, termasuk siswa disabilitas, kerap diposisikan sebagai kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus atau bahkan dianggap sebagai beban dalam sistem pendidikan. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa hambatan yang dialami siswa disabilitas tidak hanya berasal dari kondisi individu, tetapi juga dari sistem sekolah yang belum sepenuhnya inklusif.<sup>2</sup>

Konsep pendidikan inklusif hadir sebagai upaya untuk menjamin bahwa siswa disabilitas memperoleh hak pendidikan yang sama dengan siswa lainnya. Pendidikan inklusif menekankan bahwa siswa disabilitas dapat belajar bersama di sekolah reguler dengan dukungan yang sesuai. Namun, penerapan pendidikan inklusif di lapangan sering kali belum berjalan optimal karena banyak sekolah yang belum siap menerima siswa disabilitas. Ketidaksiapan tersebut dapat dilihat dari keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya media pembelajaran yang aksesibel,

---

<sup>1</sup> Fatmawati, Khotimah S. & Radiana, U. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Melalui Transformasi Manajemen Sekolah Di Sma Negeri 3 Sanggau*. Nusra: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan, 5(4), (2024). 1768–1776.

<sup>2</sup> Allison C. Carey, *Disability and the Sociological Imagination* New York: Routledge, (2023), 234.

kurikulum yang belum adaptif, serta minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mendampingi siswa disabilitas.

Carey menegaskan bahwa inklusi bukan hanya persoalan menempatkan siswa disabilitas di kelas reguler, melainkan memastikan bahwa mereka benar-benar terlibat, diterima, dan memperoleh kesempatan belajar yang setara. Dengan demikian, sekolah perlu melakukan persiapan yang matang sebelum menerapkan pendidikan inklusif.<sup>3</sup> Persiapan tersebut mencakup peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, penyesuaian metode pembelajaran, serta penciptaan budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Tanpa persiapan tersebut, pendidikan inklusif berisiko hanya menjadi kebijakan formal tanpa pelaksanaan yang efektif.

Selain persoalan kesiapan sekolah, tantangan lain yang dihadapi siswa disabilitas adalah stigma sosial. Pelabelan terhadap disabilitas sering menimbulkan ekspektasi rendah dari guru, orang tua, maupun lingkungan sekitar. Siswa disabilitas kerap dianggap kurang mampu, lambat belajar, atau sulit mengikuti kegiatan sekolah.<sup>4</sup> Pandangan semacam ini dapat memengaruhi hubungan sosial di sekolah dan menurunkan rasa percaya diri siswa.

Meskipun stigma sosial sulit dihilangkan sepenuhnya, keberadaannya tidak seharusnya menghambat proses belajar siswa disabilitas. Yang menjadi penting adalah bagaimana siswa mampu bertahan dan beradaptasi, serta bagaimana guru dapat menjalankan perannya sebagai pendidik sekaligus agen perubahan sosial. Guru memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang suportif, menumbuhkan interaksi positif antar siswa, serta menolak praktik diskriminasi di sekolah. Ketika guru mampu menjalankan peran tersebut, stigma sosial dapat

---

<sup>3</sup> Allison C. *Disability and the Sociological Imagination*. New York: Routledge, (2023). 89

diminimalkan dampaknya terhadap perkembangan akademik maupun sosial siswa disabilitas.

Dalam sistem PPDB, siswa disabilitas dapat mendaftar melalui jalur afirmasi yang secara khusus diperuntukkan bagi siswa dari kelompok kurang mampu dan berkebutuhan khusus, dengan kuota minimal 15% dari total daya tampung sekolah. Jalur lain yang tersedia adalah jalur perpindahan orang tua, yang diberikan kepada siswa yang orang tuanya berpindah tugas ke wilayah tertentu, serta jalur prestasi yang dapat diikuti oleh siswa disabilitas yang memiliki pencapaian akademik atau non-akademik tertentu.

Meskipun kebijakan pendidikan inklusif sudah diterapkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur sekolah yang belum sepenuhnya ramah bagi siswa disabilitas, seperti aksesibilitas bagi siswa tunadaksa atau ketersediaan alat bantu belajar. Selain itu, masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi dalam menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Kurangnya sosialisasi mengenai jalur afirmasi dalam PPDB juga membuat banyak calon peserta didik disabilitas tidak mengetahui hak mereka untuk mengakses sekolah negeri. Selain kendala teknis, stigma sosial terhadap siswa disabilitas masih menjadi hambatan dalam penerimaan mereka di lingkungan sekolah. Banyak masyarakat dan siswa non-disabilitas yang masih memandang siswa berkebutuhan khusus sebagai individu yang berbeda atau kurang mampu, sehingga menyebabkan kesulitan dalam interaksi sosial di sekolah.

Di Jakarta, beberapa SMA Negeri telah menerapkan kebijakan pendidikan inklusif, salah satunya adalah SMA Negeri 76 Jakarta. Efisiensi pendidikan inklusi dipengaruhi oleh beberapa elemen dalam pelaksanaannya, termasuk penerimaan lingkungan sekolah, kesediaan guru, ketersediaan sumber daya, dan tingkat inklusi siswa penyandang disabilitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat bagaimana SMA Negeri 76 Jakarta mengakomodasi siswa dengan disabilitas dan

bagaimana siswa tersebut beradaptasi untuk terlibat semaksimal mungkin dalam proses pendidikan.

**Tabel 1.1 Jenis Disabilitas di SMA Negeri 76 Jakarta**

| Jenis Disabilitas        | Jumlah Siswa |
|--------------------------|--------------|
| Tuna Netra               | 1            |
| Slow Learner (IQ Rendah) | 3            |

Sumber: Hasil Observasi Sekolah

Berdasarkan analisis tabel 1.1 , terdapat jenis-jenis siswa disabilitas yang ada di SMA Negeri 76 Jakarta, Berikut penjelasan mengenai Jenis-jenis disabilitas:

- Tuna Netra : Tunanetra adalah istilah yang merujuk pada individu yang mengalami gangguan Penelitian ini berfokus pada gangguan penglihatan, baik yang total maupun parsial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis secara mendalam berbagai sumber yang relevan untuk mencapai kesimpulan yang komprehensif. Anak-anak tunanetra umumnya menunjukkan karakteristik seperti keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi visual, serta hambatan dalam membaca, menulis, dan mobilitas. Hambatan-hambatan ini dapat memengaruhi perkembangan anak di berbagai bidang, termasuk keterampilan kognitif, akademik, sosial, emosional, dan perilaku. Oleh karena itu, anak-anak tunanetra memerlukan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang berbeda dari pendidikan umum. Metode yang dapat digunakan antara lain penggunaan media grafis khusus, alat bantu belajar, dan teknologi bantu untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif.
- Slow Learner (IQ Rendah) : Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar memiliki keterbatasan dalam potensi intelektualnya, yang menyebabkan mereka belajar lebih lambat. Mereka memiliki tingkat kecerdasan sedikit di

bawah rata-rata, dengan IQ antara 80 dan 90. Mereka mengalami keterlambatan belajar di semua mata pelajaran. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar sering disebut sebagai anak-anak di ambang batas, yang berada di antara kategori kecerdasan rata-rata dan keterbelakangan mental.<sup>5</sup> Menurut definisi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, slow learner adalah anak yang memiliki rata-rata nilai di sekolah di bawah enam, sehingga berisiko tinggi untuk tidak naik kelas. Anak-anak ini memiliki tingkat intelegensi di bawah rata-rata, sekitar 75 hingga 90. Mereka umumnya memperoleh nilai yang relatif rendah di semua mata pelajaran karena mengalami kesulitan memahami materi. Selain itu, mereka membutuhkan penjelasan berulang mengenai topik-topik tertentu yang dibahas di kelas, dan mereka menguasai keterampilan dengan lambat beberapa di antaranya bahkan mungkin tidak menguasai keterampilan tertentu sama sekali. Hampir setiap sekolah inklusif memiliki siswa dengan kesulitan belajar. Lisdiana melaporkan bahwa sekitar 14,1% anak-anak mengalami kesulitan belajar.<sup>6</sup> Anak yang lambat belajar dikarenakan oleh dua faktor, yaitu faktor internal (genetik/hereditas) dan faktor eksternal (lingkungan). Faktor internal berasal dari dalam diri individu, di mana kelainan perilaku pada anak yang tergolong slow learner menunjukkan adanya ketidaksempurnaan pada sistem saraf pusat. Keadaan ini biasanya terjadi saat anak masih dalam kandungan atau saat dilahirkan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan, seperti nutrisi, kesehatan, kualitas stimulasi, iklim emosional keluarga, dan jenis umpan balik yang diterima lewat perilaku. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi kemampuan akademik seseorang (Mardianti, 2013).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Suryani, Y. E. Kesulitan belajar. *Magistra, Jurnal Pendidikan* (2010). 22(73), 33.

<sup>6</sup> Aziz, A. N., Sugiman, S., & Prabowo, A. Analisis Proses Pembelajaran Matematika pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Slow Learner di Kelas Inklusif. *Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif*, 6(2), (2016). 111.

<sup>7</sup> Mardianti, M. Pengaruh Slow Learner dan Kejenuhan Belajar Terhadap Kesulitan Belajar Fisika Siswa Mts Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa. *JPF (Jurnal Pendidikan Fisika) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 4(1), (2013). 14±27

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas implementasi pendidikan inklusif, sebagian besar masih berfokus pada aspek kebijakan secara umum atau pada jenjang pendidikan tertentu, seperti sekolah dasar. Penelitian yang secara spesifik mengkaji proses penerimaan siswa disabilitas melalui jalur PPDB afirmasi di tingkat sekolah menengah atas, serta mengaitkannya dengan dinamika stigma sosial dan strategi adaptasi siswa, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada tahap penerimaan siswa disabilitas, serta bagaimana stigma sosial dan proses adaptasi terjadi dalam konteks sekolah menengah atas.

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi Pendidikan inklusif di SMA Negeri, khususnya terkait dengan penerimaan dan adaptasi siswa disabilitas. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pendidikan inklusif, kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah kesiapan sekolah dalam menerima siswa disabilitas, baik dari segi infrastruktur, fasilitas pendukung, maupun kompetensi tenaga pendidik dalam mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

Selain itu, meskipun terdapat jalur afirmasi dalam PPDB yang memberikan kesempatan bagi siswa disabilitas untuk bersekolah di SMA Negeri, masih ditemukan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan ini, sehingga tidak semua calon peserta didik dan orang tua memahami mekanisme pendaftaran serta hak mereka dalam mengakses pendidikan inklusif. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah stigma sosial terhadap siswa disabilitas, yang dapat berdampak pada interaksi mereka dengan guru maupun sesama siswa non-disabilitas. Dari aspek adaptasi, siswa disabilitas sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan

diri dengan lingkungan sekolah, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun psikologis. Kurangnya pemahaman dari guru dan teman sebaya mengenai kebutuhan khusus mereka dapat menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran serta integrasi dalam lingkungan sosial sekolah. Hal ini berpotensi memengaruhi kesejahteraan psikologis siswa disabilitas dan keberlanjutan pendidikan mereka di sekolah reguler. Maka, permasalahan penelitian yang penulis angkat Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan inklusif dalam proses penerimaan siswa disabilitas melalui jalur PPDB afirmasi di SMA Negeri 76 Jakarta?
2. Bagaimana bentuk stigma sosial yang dialami siswa disabilitas di lingkungan sekolah?
3. Bagaimana proses penerimaan serta interaksi sosial siswa disabilitas dengan guru dan teman sebaya di lingkungan sekolah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam proses penerimaan siswa disabilitas melalui jalur PPDB afirmasi di SMA Negeri 76 Jakarta.
2. Untuk mengetahui bentuk stigma sosial terhadap siswa disabilitas di lingkungan sekolah.
3. Untuk memahami bagaimana siswa disabilitas mengalami proses penerimaan serta interaksi sosial di lingkungan sekolah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga aspek utama:

### 1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi Pendidikan khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan inklusif dan stigma sosial terhadap penyandang disabilitas.

### 2. Manfaat Praktis

1. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif serta mendukung kenyamanan siswa disabilitas..
2. Bagi Guru dan Tenaga Pendidik: Menyediakan informasi tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung adaptasi siswa disabilitas dan memberikan strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif.
3. Bagi Siswa Non-Disabilitas: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya inklusivitas serta mengurangi stigma terhadap siswa disabilitas.
4. Bagi Orang Tua: Memberikan wawasan mengenai kebijakan pendidikan inklusif dan hak-hak pendidikan bagi anak disabilitas, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam mendukung anaknya di lingkungan sekolah.
5. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Memberikan data empiris yang dapat dijadikan dasar dalam mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan pendidikan inklusif dan PPDB afirmasi bagi siswa disabilitas.

### 3. Manfaat Sosial

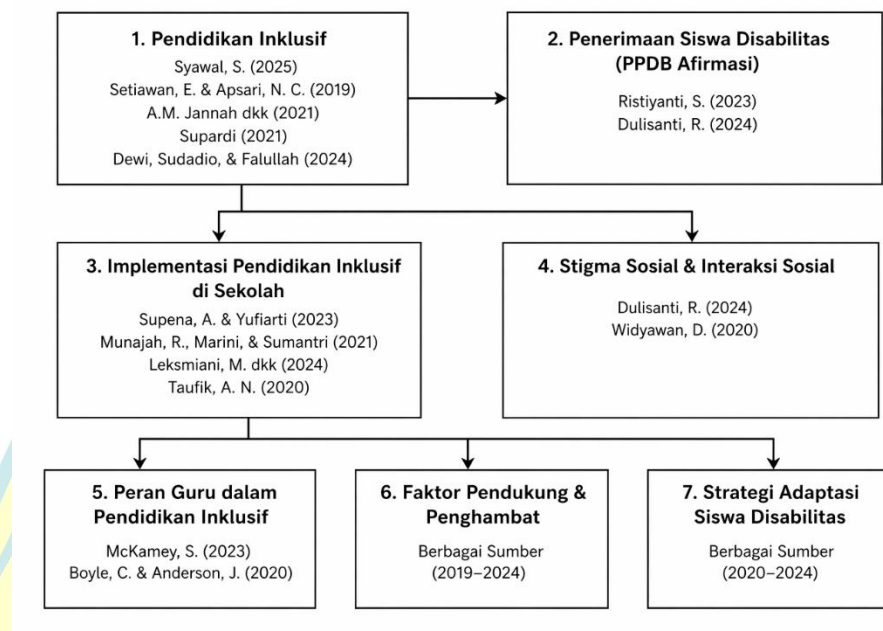
1. Mendorong kesetaraan dalam pendidikan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sosialisasi pentingnya pendidikan inklusif.

2. Membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif, toleran, dan ramah bagi semua peserta didik, termasuk siswa disabilitas.
3. Mengurangi diskriminasi dan meningkatkan interaksi sosial antara siswa disabilitas dan non-disabilitas di sekolah, sehingga membentuk masyarakat yang lebih inklusif di masa depan.

### **1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan yang mendalam terhadap beberapa literatur yang relevan dan kredibel. Hal ini dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang akan diteliti, yaitu implementasi pendidikan inklusif dalam penerimaan siswa disabilitas di SMA Negeri 76 Jakarta. Selain itu, tinjauan pada literatur sejenis juga dilakukan untuk membangun dasar teoritis yang kuat, mengidentifikasi celah penelitian, dan menghindari potensi plagiarisme. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini ditargetkan dapat memberikan partisipasi yang signifikan terhadap pengembangan kajian sosiologi pendidikan, khususnya terkait pendidikan inklusif dan stigma sosial. Adapun literatur yang dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini meliputi beberapa jurnal nasional, jurnal internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Skema 1. 1 Tinjauan Literatur Sejenis



Sumber: Olah data Peneliti, 2026.

**Pertama**, penelitian oleh Sahrul Syawal (2025) dengan judul “*Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Belajar yang ramah untuk semua*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Pendidikan inklusif dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, serta untuk memahami pengalaman dan perspektif guru, siswa, dan orang tua dalam pendidikan inklusif.<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan inklusif sudah berjalan namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, kesiapan guru, serta adanya stigma sosial. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pendidikan inklusif dan menyoroti pengalaman siswa disabilitas di lingkungan sekolah. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian membahas pendidikan inklusif secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik

<sup>8</sup> Sahrul Syawal, “Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Belajar yang Ramah untuk Semua,” *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 6, No. 3 (2025). 612.

pada proses penerimaan siswa disabilitas serta analisis terhadap stigma sosial yang mereka alami.

**Kedua**, penelitian oleh Arifin Supena dan Yufiarti (2023) dengan judul *“Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar”*.<sup>9</sup> Penelitian ini melakukan kajian kualitatif untuk mengkaji bagaimana pendidikan inklusif diterapkan di sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesediaan sekolah, kompetensi guru, dan ketersediaan fasilitas yang memadai merupakan faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis sebelumnya, karena keduanya membahas penerapan pendidikan inklusif, namun memiliki perbedaan pada jenjang pendidikan dan fokus analisis, di mana penelitian penulis lebih menyoroti penerimaan siswa disabilitas serta dinamika stigma sosial di tingkat SMA.

**Ketiga**, penelitian oleh Supardi (2021) dengan judul *“Kesenjangan antara kebijakan Pendidikan Inklusif dan Praktik di Lapangan”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah dengan realitas implementasinya di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kebijakan dan praktik di lapangan, terutama dalam hal fasilitas dan kesiapan tenaga pendidik.<sup>10</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas implementasi kebijakan pendidikan inklusif, namun penelitian penulis lebih berfokus pada tahap penerimaan siswa disabilitas serta pengalaman sosial mereka di lingkungan sekolah.

**Keempat**, penelitian oleh Dewi, Sudadio, dan Falullah (2024) dengan judul *“Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif”*. Sebagai bagian dari penelitian ini, dilakukan penyelidikan kualitatif untuk mengetahui bagaimana sekolah-sekolah menerapkan pendidikan inklusif.

---

<sup>9</sup> Arifin Supena dan Yufiarti dengan judul *“Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar (2023)”*.

<sup>10</sup> Supardi. *Kesenjangan antara Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Praktik di Lapangan*. *Society Journal*, (2021). 14(1).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan di kalangan guru, dan kurangnya fasilitas pendukung.<sup>11</sup> Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis dalam mengkaji hambatan implementasi pendidikan inklusif, namun penelitian penulis juga menambahkan analisis mengenai stigma sosial yang dialami siswa disabilitas.

**Kelima**, penelitian oleh Mia Leksmiani, Suherman, dan M. Syadeli Hanaf (2024) dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Tantangannya di Sekolah Menengah Atas”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan telah dimulai, masih terdapat tantangan di bidang pelatihan guru, infrastruktur, dan perbedaan pandangan di antara para guru. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena keduanya dilakukan di tingkat sekolah menengah atas, namun penelitian penulis lebih spesifik pada proses penerimaan siswa disabilitas melalui jalur PPDB afirmasi.

**Keenam**, penelitian oleh A.M. Jannah dan rekan-rekan dengan judul *“Model Layanan Pendidikan Inklusif di Indonesia”* mengkaji berbagai model layanan Pendidikan inklusif di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa bukan hanya langkah-langkah kebijakan yang menentukan keberhasilan pendidikan inklusif, tetapi juga faktor budaya, politik, serta kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pendidikan inklusif secara konseptual, namun penelitian penulis lebih menitikberatkan pada kajian empiris di satu sekolah dengan fokus pada implementasi kebijakan dan pengalaman siswa.<sup>12</sup>

**Ketujuh**, penelitian oleh R. Munajah, A. Marini, dan M.S. Sumantri dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar”*

<sup>11</sup> Dewi, Sudadio, & Falullah. *Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah*. (2024).

<sup>12</sup> A.M. Jannah, dkk *Model Layanan Pendidikan Inklusif di Indonesia*. Model layanan pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 5(1), (2021). 1–12.

menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar telah mendapat dukungan dari guru dan masyarakat, namun masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan pelatihan tenaga pendidik.<sup>13</sup> Penelitian ini relevan dalam memberikan gambaran umum tentang implementasi pendidikan inklusif, namun berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada tingkat SMA dan aspek penerimaan siswa.

**Kedelapan,** penelitian oleh Achmad Nur Taufik dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk mewujudkan Kesetaraan Belajar di Tingkat SMA”* menunjukkan bahwa pendidikan inklusif telah berjalan cukup baik dalam menjamin kesetaraan belajar bagi siswa disabilitas, namun masih diperlukan peningkatan dalam hal fasilitas, dukungan guru, serta kebijakan yang lebih responsif.<sup>14</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dalam konteks jenjang pendidikan, namun penelitian penulis lebih spesifik dalam mengkaji tahap penerimaan siswa disabilitas serta dinamika sosial yang terjadi setelah mereka diterima di sekolah.

**Kesembilan,** penelitian oleh Reza Dulisanti (2024) dengan judul *“Penerimaan Sosial dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi kasus pada Proses Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang)”*.<sup>15</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pendidikan inklusif diterapkan serta bagaimana siswa, guru, dan orang tua turut berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif menawarkan banyak manfaat, namun juga dihadapkan pada sejumlah kendala. seperti kesiapan guru, keterbatasan fasilitas, dan adanya stigma sosial. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pendidikan inklusif dan tantangan dalam pelaksanaannya. Namun,

---

<sup>13</sup> R. Munajah, dkk. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD. Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(2), (2021). 110–120.

<sup>14</sup> Achmad Nur Taufik. *Implementasi kebijakan pendidikan inklusif untuk mewujudkan kesetaraan belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat SMA di Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya. (2020)

<sup>15</sup> Reza Dulisanti, *“Penerimaan Sosial dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus pada Proses Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang)”*, 2024

perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih umum membahas implementasi pendidikan inklusif, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada penerimaan siswa disabilitas, stigma sosial, serta proses adaptasi siswa di SMA Negeri 76 Jakarta.

**Kesepuluh**, penelitian oleh Eko Setiawan dan Nurliana C. Apsari dengan judul *“Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesenjangan dan Non-Diskriminatif di Bidang Pendidikan”* menekankan bahwa pendidikan inklusif merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan dan mengurangi diskriminasi dalam sistem pendidikan. Penelitian ini bersifat konseptual dan memberikan<sup>16</sup> dasar pemikiran mengenai pentingnya pendidikan inklusif sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini mendukung penelitian penulis dalam aspek teoritis, namun penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi nyata di lapangan.

**Kesebelas**, penelitian oleh Dena Widyawan dengan judul *“Inklusi dalam Pendidikan Jasmani: Perspektif Siswa Penyandang Disabilitas”* menunjukkan bahwa siswa disabilitas sering mengalami keterbatasan dalam partisipasi pembelajaran akibat faktor fasilitas, metode pembelajaran, serta interaksi sosial. Penelitian ini relevan dalam memahami pengalaman siswa disabilitas, namun berbeda dalam fokus kajian yang lebih spesifik pada mata pelajaran tertentu.

**Keduabelas**, Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sue McKamey (2023) dengan judul *“General Education Teachers Mindset on the Acceptance of Students with Significant Disabilities in Inclusive Classrooms”* mengkaji bagaimana pola pikir guru pendidikan umum, khususnya growth mindset dan fixed mindset, mempengaruhi penerimaan siswa dengan disabilitas signifikan di kelas inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pikir sangat memengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif pada guru, di mana guru yang memiliki growth mindset cenderung lebih terbuka, adaptif, dan menerima

---

<sup>16</sup> Eko Setiawan & Nurliana C. Apsari. Pendidikan inklusif: Upaya mewujudkan kesetaraan dan non-diskriminatif di bidang pendidikan bagi anak dengan disabilitas. Jurnal Sosial Humaniora, 10(2), (2019).128–139.

keberagaman siswa dibandingkan dengan guru yang memiliki fixed mindset. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pendidikan inklusif dan penerimaan siswa disabilitas di lingkungan sekolah menengah serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami realitas implementasi pendidikan inklusif.

**Ketigabelas**, penelitian yang dilakukan oleh Christopher Boyle dan Joanne Anderson (2020) dengan judul *“The Importance of Teacher Attitudes to Inclusive Education”* membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sikap guru terhadap pendidikan inklusif serta pentingnya sikap tersebut dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap guru adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana guru dengan sikap positif cenderung lebih mampu mendukung keperluan siswa disabilitas dan menciptakan suasana pembelajaran yang ramah serta tidak diskriminatif.

**Keempatbelas**, penelitian oleh Sinta Ristiyanti dengan judul *“Policy of Acceptance of Students with Disabilities in Inclusion Schools”* membahas kebijakan penerimaan siswa disabilitas di sekolah inklusi. Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat pembatasan dalam penerimaan siswa disabilitas akibat keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana. Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas penerimaan siswa disabilitas, namun penelitian penulis juga menambahkan analisis mengenai stigma sosial dan interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah.

Berdasarkan pengelompokan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi pendidikan inklusif secara umum, serta belum secara spesifik mengkaji tahap penerimaan siswa disabilitas melalui jalur PPDB afirmasi. Selain itu, kajian mengenai stigma sosial dan proses adaptasi siswa disabilitas dalam konteks sekolah menengah atas juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dengan mengkaji secara spesifik implementasi kebijakan Pendidikan.

## 1.6. Kerangka Konseptual

### 1.6.1 Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah Pendidikan yang inklusi atau inklusif Istilah “pendidikan inklusif”, yang diciptakan oleh UNESCO, berasal dari frasa “pendidikan untuk semua”, yang menunjukkan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua orang dan menggunakan pendekatan pedagogis yang berusaha menjangkau semua orang, tanpa kecuali. Setiap orang memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dari pendidikan. Keberagaman tidak membedakan hak dan kesempatan ini. Perbedaan fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan posisi sosial ekonomi tidak membedakan kesempatan. “Pendidikan inklusif” adalah istilah yang menggambarkan cara anak-anak penyandang disabilitas diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan anak-anak penyandang disabilitas dalam kurikulum, lingkungan sekolah, serta interaksi sosial yang mereka alami di sana. Oleh karena itu, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem pendidikan yang memungkinkan anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran di kelas reguler bersama teman-teman sebayanya di sekolah terdekat.<sup>12</sup>

Tujuan pendidikan inklusif: Di Indonesia, pendidikan inklusif dilaksanakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya; (2) Meningkatkan pelaksanaan wajib belajar di tingkat sekolah dasar; (3) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menurunkan angka putus sekolah; serta (4) Mewujudkan pendidikan inklusif secara menyeluruh. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara berhak atas pendidikan yang berkualitas dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 51, yang mengatur tentang anak yang tidak bersekolah.

Beberapa undang-undang Indonesia, seperti UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, mengatur pendidikan inklusif. Sekolah harus menerima siswa berkebutuhan berdasarkan peraturan tersebut khusus dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran mereka (Depdiknas, 2009). Lebih lanjut, dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 Tahun 2023, pemerintah menegaskan kembali pentingnya pendidikan inklusif dengan membentuk unit disabilitas di sekolah agar siswa dengan disabilitas dapat didukung secara optimal dalam proses belajar mengajar (Kemdikid<sup>17</sup>, 2023). Secara filosofis dan hukum, hak atas pendidikan berkualitas tinggi untuk semua warga negara. Hal ini juga berlaku bagi para penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dan dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan ruh dari UUD 1945 seharusnya menentukan seluruh proses penyelenggaraan negara ini. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “mencerdaskan mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” merupakan salah satu tujuan didirikannya Republik Indonesia. Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Anak-Anak Penyandang Disabilitas, yang menggambarkan upaya pemerintah untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Terkait pendidikan inklusif, undang-undang ini bertujuan untuk menyoroti beberapa poin utama: 1) Landasan, prinsip, dan tujuan. Pasal 2 membahas upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Pasal 3 membahas upaya-upaya yang didasarkan pada iman dan takwa

---

<sup>17</sup> Depdiknas. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat persatuan keluarga, keadilan dan kesetaraan, keseimbangan, kerukunan, dan persatuan dalam kehidupan, hukum, kemerdekaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 5, Setiap peyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, Pasal 6, Setiap penyandang cacat berhak memperoleh: (Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan), (Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya), (Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya, aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya), (rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial), dan (hak yang sama untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi anak penyandang cacat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat). Dalam hal kewajiban, Pasal 7 menyatakan bahwa setiap penyandang cacat memiliki kewajiban yang sama dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kewajiban sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak tergantung pada jenis dan derajat kecacatan, tingkat pendidikan, dan kemampuan mereka.

### **1.6.2 Siswa Disabilitas**

Siswa penyandang disabilitas adalah siswa yang, dalam jangka waktu yang cukup lama, mengalami gangguan fisik, intelektual, psikologis, atau sensorik yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif di kelas, kecuali jika mereka menerima dukungan atau penyesuaian yang sesuai. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan disabilitas sebagai suatu kondisi yang melibatkan gangguan pada fungsi atau struktur tubuh, keterbatasan dalam melakukan aktivitas tertentu, serta kesulitan dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, yang disebabkan oleh interaksi antara kondisi kesehatan seseorang dan lingkungannya..<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>World Health Organization. (2011). World Report on Disability. Geneva: World Health Organization.

Siswa Disabilitas dalam perspektif sosiologi, disabilitas tidak hanya dipahami sebagai kondisi medis atau keterbatasan individu, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara individu dengan struktur sosial dan lingkungan di sekitarnya.<sup>19</sup> Oleh karena itu, hambatan yang dialami oleh siswa disabilitas sering kali muncul bukan hanya karena kondisi tubuh atau kemampuan mereka, tetapi juga karena adanya faktor sosial seperti kurangnya aksesibilitas, stigma, diskriminasi, serta sistem pendidikan yang belum sepenuhnya inklusif.

Pandangan lain dikemukakan oleh Erving Goffman, yang menjelaskan bahwa individu dengan kondisi yang berbeda dari standar sosial sering kali mengalami *stigma sosial*. Goffman menyatakan bahwa stigma merupakan label negatif yang diberikan masyarakat kepada individu yang dianggap berbeda, termasuk individu dengan disabilitas. Dalam lingkungan sekolah, stigma ini dapat muncul dalam bentuk perlakuan diskriminatif, pengucilan sosial, atau rendahnya ekspektasi terhadap kemampuan siswa disabilitas.<sup>20</sup> Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk membangun lingkungan sosial yang inklusif dan menghargai keberagaman agar siswa disabilitas dapat berkembang secara optimal.

Menurut Carol Thomas dalam *Sociologies of Disability and Illness*, disabilitas tidak hanya dipahami sebagai gangguan fisik atau kondisi medis yang dimiliki seseorang, tetapi sebagai pengalaman sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan dan relasi masyarakat. Thomas membedakan antara *impairment* sebagai kondisi tubuh atau fungsi tertentu, dengan *disability* sebagai hambatan sosial yang muncul ketika masyarakat tidak mampu mengakomodasi perbedaan tersebut.<sup>21</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, siswa disabilitas adalah peserta didik yang memiliki kondisi fisik, sensorik, intelektual, atau mental tertentu, namun hambatan utama yang mereka hadapi dalam pendidikan sering berasal dari lingkungan sekolah. Hambatan itu dapat berupa gedung yang tidak aksesibel, metode

---

<sup>19</sup>Berger, P. I., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York : Anchor Books.

<sup>20</sup> Erving Goffman, (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Prentice-Hall.

<sup>21</sup> Carol Thomas, *Sociologies of Disability and Illness* (London: Palgrave Macmillan, 2007), 10–12.

pembelajaran yang tidak sesuai, kurikulum yang kaku, maupun sikap negatif dari guru dan teman sebaya. Dengan kata lain, siswa disabilitas mengalami kesulitan bukan semata-mata karena kondisi individu, tetapi karena sistem pendidikan yang belum inklusif

Menurut Allison C. Carey dalam buku *Disability Identity and Socialization*, siswa penyandang disabilitas dipahami sebagai individu yang mengembangkan identitas sosialnya melalui interaksi dengan keluarga, teman sebaya, guru, dan lingkungan sekolah. Dari perspektif sosiologis, disabilitas dipandang tidak hanya sebagai kondisi fisik atau mental, tetapi juga sebagai pengalaman sosial yang dibentuk oleh penerimaan, stigmatisasi, dan perlakuan masyarakat terhadap individu tersebut. Siswa penyandang disabilitas sering kali menghadapi stigmatisasi dan pelabelan, yang dapat merusak kepercayaan diri dan citra diri mereka. Namun, melalui proses sosialisasi yang positif dan lingkungan yang inklusif, siswa penyandang disabilitas dapat mengembangkan identitas diri yang positif, menerima situasi mereka, dan bangga dengan identitas mereka sebagai penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pengalaman sosial di sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan identitas sosial, kepercayaan diri, dan kemampuan siswa penyandang disabilitas untuk berinteraksi di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mengalami hambatan dalam berpartisipasi secara optimal dan efektif di kehidupan sehari-hari serta menghadapi kesulitan ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan warga negara lainnya atas dasar kesetaraan<sup>22</sup>. Definisi ini menegaskan bahwa faktor lingkungan memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana individu

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta.

dengan disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam dunia pendidikan.<sup>23</sup>

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa disabilitas tidak hanya dipahami sebagai individu yang memiliki keterbatasan tertentu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Perspektif sosiologi menekankan pentingnya perubahan dalam struktur sosial, kebijakan pendidikan, serta sikap masyarakat agar tercipta lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa disabilitas. Dalam penelitian ini, konsep disabilitas tidak hanya dipahami dalam perspektif medis, tetapi juga dalam perspektif sosial. Artinya, keterbatasan yang dialami individu tidak semata-mata berasal dari kondisi fisik atau kognitif, tetapi juga dari hambatan sosial yang muncul akibat lingkungan yang belum inklusif.

### **1.6.3 Teori Stigma Sosial**

Stigma Sosial merupakan label atau penilaian negative yang diberikan oleh Masyarakat terhadap individual tau kelompok tertentu yang dianggap berbeda dari norma sosial yang berlaku. Stigma sering kali muncul karena adanya stereotip, prasangka, atau kurangnya pemahaman terhadap kondisi individu orang tersebut. Dalam lingkungan sosial. Individu yang mengalami stigma dapat menghadapi berbagai bentuk perlakuan diskriminatif, seperti pengucilan, penilaian negative, maupun perlakuan yang berbeda dari orang lain.

Menurut Erving Goffman dalam bukunya *Stigma : Notes on the Management of Spoiled Identity (1963)*, stigma sosial merupakan suatu atribut atau karakteristik yang dimiliki seseorang yang menyebabkan individu tersebut dipandang negatif oleh masyarakat sehingga mengurangi penerimaan sosial terhadap dirinya. Goffman menjelaskan bahwa stigma muncul ketika ada perbedaan

---

antara identitas sosial yang diharapkan masyarakat dan yang sebenarnya dimiliki individu.<sup>24</sup> Ketika seseorang memiliki ciri atau kondisi yang dianggap menyimpang dari norma sosial yang berlaku, masyarakat cenderung memberikan label negatif yang membuat individu tersebut dipandang kurang bernilai atau berbeda dari orang lain. Akibatnya, individu yang mengalami stigma sering menghadapi berbagai bentuk perlakuan tidak adil seperti diskriminasi, penolakan sosial, serta keterbatasan dalam berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial.

Goffman juga menjelaskan bahwa stigma dapat muncul dalam beberapa bentuk, seperti stigma yang berkaitan dengan kondisi fisik, karakter atau perilaku yang dianggap menyimpang, serta stigma yang berkaitan dengan identitas kelompok tertentu. Oleh karena itu, stigma sosial tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu, tetapi juga terbentuk melalui cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks Pendidikan, siswa disabilitas dapat mengalami stigma karena adanya perbedaan kondisi fisik maupun kemampuan dibandingkan dengan siswa lainnya. Stigma tersebut dapat mempengaruhi interaksi sosial mereka dengan teman sebaya maupun dengan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Teori stigma dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana siswa disabilitas dipersepsikan dalam lingkungan sekolah serta bagaimana proses penerimaan sosial mereka berlangsung dalam system Pendidikan inklusif.

#### **1.6.4 Strategi Adaptasi Siswa Disabilitas**

Dalam menghadapi stigma sosial yang muncul dalam lingkungan sekolah, siswa disabilitas sering kali mengembangkan berbagai strategi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Strategi tersebut dilakukan agar mereka dapat tetap berpartisipasi dalam kegiatan belajar maupun dalam interaksi sosial dengan teman-temannya. Menurut Erving Goffman, individu yang mengalami

---

<sup>21</sup> Erving Goffman, (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Prentice-Hall.

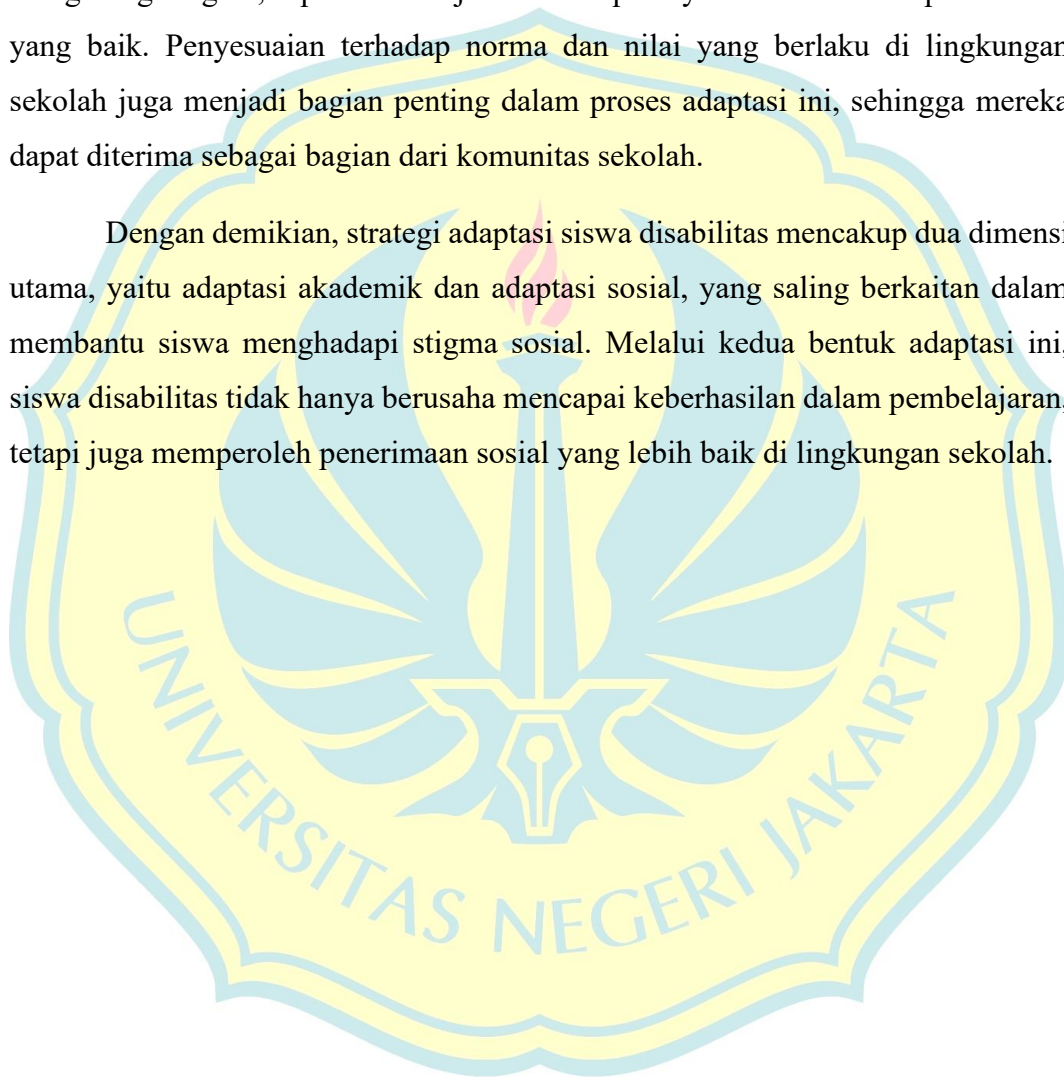
stigma biasanya melakukan berbagai bentuk manajemen identitas sosial untuk menghadapi pandangan masyarakat terhadap dirinya. Strategi tersebut dapat berupa upaya untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki, membangun hubungan sosial yang baik dengan lingkungan sekitar, maupun berusaha menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam lingkungan sosial.

Strategi adaptasi siswa disabilitas dalam lingkungan sekolah merupakan respons terhadap adanya stigma sosial yang dapat memengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan akademik maupun interaksi sosial. Dalam menghadapi kondisi tersebut, siswa disabilitas tidak bersikap pasif, melainkan mengembangkan berbagai cara untuk menyesuaikan diri agar tetap dapat berfungsi secara optimal. Mengacu pada pemikiran Erving Goffman, individu yang mengalami stigma cenderung melakukan manajemen identitas sosial, yaitu upaya untuk mengontrol bagaimana dirinya dipersepsikan oleh orang lain. Dalam konteks ini, siswa disabilitas berusaha menampilkan identitas positif agar dapat diterima di lingkungan sekolah.

Dalam aspek adaptasi akademik, siswa disabilitas menunjukkan berbagai upaya untuk tetap mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Mereka berusaha membuktikan kemampuan yang dimiliki melalui keaktifan di kelas, penyelesaian tugas, serta pencapaian prestasi. Selain itu, mereka juga mengembangkan strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhan, seperti menggunakan metode belajar alternatif atau alat bantu tertentu. Upaya ini mencerminkan keinginan untuk menunjukkan bahwa keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi penghalang dalam mencapai keberhasilan akademik. Di sisi lain, mereka juga berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan dan aturan akademik yang berlaku di sekolah.

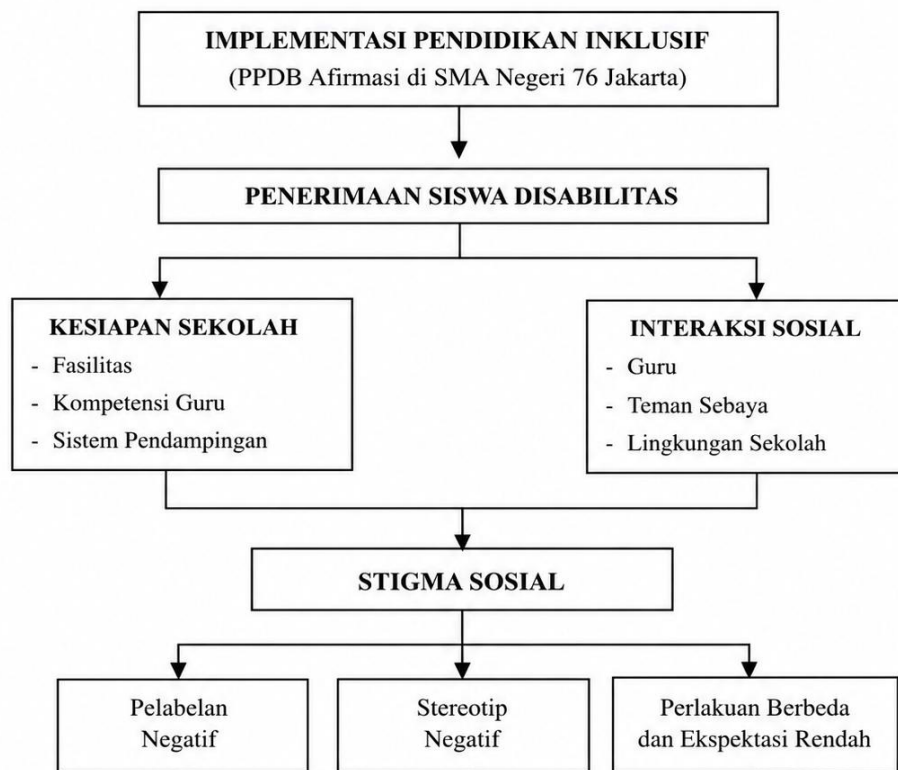
Sementara itu, dalam aspek adaptasi sosial, siswa disabilitas berupaya membangun hubungan yang positif dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini dilakukan melalui interaksi yang aktif dengan teman sebaya, keterlibatan dalam kegiatan kelompok, serta sikap terbuka dalam berkomunikasi. Selain itu, mereka juga melakukan manajemen kesan dengan menampilkan perilaku yang dapat mengurangi stigma, seperti menunjukkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial yang baik. Penyesuaian terhadap norma dan nilai yang berlaku di lingkungan sekolah juga menjadi bagian penting dalam proses adaptasi ini, sehingga mereka dapat diterima sebagai bagian dari komunitas sekolah.

Dengan demikian, strategi adaptasi siswa disabilitas mencakup dua dimensi utama, yaitu adaptasi akademik dan adaptasi sosial, yang saling berkaitan dalam membantu siswa menghadapi stigma sosial. Melalui kedua bentuk adaptasi ini, siswa disabilitas tidak hanya berusaha mencapai keberhasilan dalam pembelajaran, tetapi juga memperoleh penerimaan sosial yang lebih baik di lingkungan sekolah.



## 1.7 Hubungan antar Konsep

**Skema 1.2 Hubungan antar Konsep**



Sumber: Olah Data Peneliti, 2026.

## 1.8 Metodologi Penelitian

### 1.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana implementasi pendidikan inklusif dijalankan di SMA Negeri 76 serta bagaimana penerimaan dan adaptasi siswa disabilitas dalam lingkungan sekolah. Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini terpusat pada satu lokasi tertentu, yaitu SMA Negeri 76 Jakarta, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara intensif, detail, dan kontekstual. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena secara umum, tetapi juga menganalisis secara

mendalam bagaimana implementasi pendidikan inklusif dijalankan dalam praktik sehari-hari di sekolah tersebut.

Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana kebijakan pendidikan inklusif diterjemahkan ke dalam sistem penerimaan peserta didik, strategi pembelajaran, serta bentuk dukungan yang diberikan kepada siswa disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana proses penerimaan sosial terjadi di lingkungan sekolah, bagaimana peran guru dan tenaga kependidikan dalam mendukung siswa disabilitas, serta bagaimana siswa disabilitas melakukan proses adaptasi baik secara akademik, sosial, maupun psikologis dalam lingkungan sekolah reguler.<sup>25</sup>

### **1.8.2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan objek dalam penelitian yang akan diamati guna memperoleh informasi yang valid dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri dari beberapa informan yang berada di lingkup SMA Negeri 76 Jakarta Timur. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif, khususnya dalam proses penerimaan siswa disabilitas melalui jalur PPDB afirmasi.

Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan guru Bimbingan Konseling (BK) yang berperan langsung dalam proses penerimaan dan pendampingan siswa disabilitas di SMA Negeri 76 Jakarta. Selain itu, terdapat informan pendukung yang terdiri dari siswa disabilitas (tunanetra dan slow learner) serta siswa non-disabilitas yang berinteraksi langsung dalam lingkungan belajar yang inklusif.

---

<sup>25</sup> John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, edisi ke-4 Los Angeles: SAGE Publications, (2018), 96–98.

Berdasarkan data sekolah, sejak tahun 2021 hingga 2024 jumlah peserta didik disabilitas yang diterima mengalami fluktuasi, namun menunjukkan pola peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, sekolah menerima dua siswa disabilitas; pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi tiga siswa; pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi empat siswa; dan pada tahun 2024 sekolah tetap mempertahankan komitmennya dengan menerima empat siswa disabilitas, yang terdiri dari kategori *slow learner* dan tunanetra. Pola penerimaan ini menunjukkan bahwa SMAN 76 Jakarta memiliki komitmen kelembagaan dalam menjalankan amanat pendidikan inklusif dibandingkan beberapa SMA Negeri lain di Jakarta Timur yang masih membatasi jumlah peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, sekolah ini memiliki karakteristik lingkungan sosial yang heterogeny baik secara ekonomi maupun latar belakang siswa sehingga menjadi ruang yang menarik untuk melihat bagaimana dinamika penerimaan dan adaptasi siswa disabilitas berlangsung di sekolah reguler. Dengan komitmen penerimaan yang stabil, fasilitas inklusi yang sedang berkembang, serta keberagaman siswa, SMAN 76 Jakarta menjadi konteks yang relevan dan strategis untuk menelaah implementasi pendidikan inklusif pada tingkat sekolah menengah atas.

**Tabel 1.2 Informan Penelitian**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>                | <b>Kategori</b>                     | <b>Usia</b> | <b>Domisili</b> |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1         | Yayuk Septi<br>Budi Rahayu | Kepala Sekolah                      | 55 Tahun    | Cakung          |
| 2         | Aulianti Jaya              | Wakil Kepala<br>Sekolah             | 47 Tahun    | Rorotan         |
| 3         | Afifah                     | Guru Bimbingan<br>Konseling         | 36 Tahun    | Cakung          |
| 4         | Ibu Warsini                | Orangtua Peserta<br>didik           | 52 Tahun    | Cakung          |
| 5         | Faiz Ahar                  | Siswa Disabilitas<br>(Slow Learner) | 17 Tahun    | Penggilingan    |
| 6         | Novalina<br>Syalina        | Siswa Disabilitas<br>(Slow Learner) | 18 Tahun    | Cakung          |
| 7         | Kesya Zahiya               | Siswa Disabilitas<br>(Slow Learner) | 18 Tahun    | Rorotan         |
| 8         | Anisa Zahra                | Siswa Disabilitas<br>(Tuna Netra)   | 17 Tahun    | Pulogadung      |
| 9         | Miftahuljannah             | Siswa Non-<br>Disabilitas           | 17 Tahun    | Cakung          |

Sumber: Oleh Data Peneliti, 2026.

### 1.8.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 76 Jakarta yang berlokasi di Jalan Tipar Cakung, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. SMA Negeri 76 Jakarta adalah salah satu sekolah menengah atas negeri di wilayah DKI Jakarta yang telah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) afirmasi bagi siswa disabilitas. SMA Negeri 76 Jakarta dipilih sebagai lokasi studi kasus dalam penelitian ini karena sekolah tersebut telah menerima siswa disabilitas dalam beberapa tahun terakhir, khususnya kategori tunanetra dan slow learner. Hal ini menjadikan sekolah tersebut relevan untuk dikaji secara lebih mendalam dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah menengah atas. Selain itu, sebagai sekolah negeri yang berada di bawah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, SMA Negeri 76 Jakarta menjadi representasi penting dalam melihat bagaimana kebijakan inklusif dijalankan pada tingkat satuan pendidikan.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Juli hingga Desember 2025. Dalam periode tersebut, peneliti melakukan proses observasi, wawancara mendalam dengan informan utama dan pendukung, serta pengumpulan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif dan mekanisme PPDB afirmasi di sekolah. Rentang waktu penelitian yang berlangsung selama enam bulan memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang cukup komprehensif mengenai dinamika implementasi pendidikan inklusif, baik dari aspek kebijakan, peran aktor sekolah, maupun proses adaptasi siswa disabilitas di lingkungan sekolah. Dengan demikian, penetapan SMA Negeri 76 Jakarta sebagai lokasi penelitian serta pemilihan periode penelitian yang tepat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji dan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi pendidikan inklusif pada tahap penerimaan siswa disabilitas di tingkat sekolah menengah atas negeri.

#### **1.8.4 Triangulasi data**

Untuk memastikan keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi data dengan cara membandingkan sumber informasi yang berbeda. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan staf SMA Negeri 76 Jakarta yang memberikan informasi mengenai kebijakan pendidikan inklusi dan implementasi jalur afirmasi dalam PPDB untuk siswa dengan disabilitas. Guru dan tenaga pendidik juga menjadi sumber data untuk mengetahui strategi pengajaran dan tantangan yang dihadapi dalam pendidikan inklusif. Selain itu, wawancara dengan siswa penyandang disabilitas memberikan wawasan tentang pengalaman mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah, sementara siswa non-disabilitas memberikan perspektif mereka tentang interaksi sosial di antara mereka. Selain pihak sekolah, orang tua siswa penyandang disabilitas juga diwawancarai untuk triangulasi data guna memahami dukungan yang diberikan keluarga dalam membantu anak menyesuaikan diri di sekolah. Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga menjadi sumber data yang penting untuk mengkonfirmasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif dan memantau pelaksanaannya di sekolah-sekolah umum.

Data penelitian ini juga dilengkapi dengan dokumen-dokumen sekolah, seperti peraturan tentang pendidikan inklusi, rapor siswa penyandang disabilitas, dan kebijakan afirmasi dalam PPDB. Observasi langsung di sekolah dilakukan untuk melihat bagaimana siswa penyandang disabilitas berinteraksi sosial dengan teman sebaya dan guru dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif mengenai implementasi pendidikan inklusi dan penyesuaian sosial siswa dengan disabilitas di SMA Negeri 76 Jakarta.

#### **1.8.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan dengan fokus penelitian. Teknik-teknik tersebut dimaksudkan untuk menghimpun data primer maupun data

sekunder yang nantinya akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait implementasi pendidikan inklusif dalam proses penerimaan siswa disabilitas. Data primer diperoleh melalui kegiatan observasi langsung di lapangan serta wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang memperkuat dan memvalidasi hasil data primer.

#### **1.8.5.1 Observasi**

Salah satu metode pengumpulan data primer adalah observasi, yaitu melihat secara langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di SMA Negeri 76 Jakarta untuk mendapatkan pemahaman faktual tentang bagaimana pendidikan inklusif diterapkan di sekolah tersebut. Observasi dilakukan terhadap berbagai aspek, antara lain proses penerimaan siswa melalui jalur afirmasi, dinamika pembelajaran di kelas yang melibatkan siswa disabilitas, pola interaksi antara siswa disabilitas dan non-disabilitas, serta kondisi sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusif.

#### **1.8.5.2 Wawancara**

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data awal digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam melalui komunikasi langsung dengan informan penelitian. Pada penelitian ini, proses wawancara melibatkan beberapa pihak, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, serta siswa disabilitas maupun non-disabilitas. Teknik wawancara yang digunakan terdiri atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sesuai dengan fokus penelitian, sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan secara lebih fleksibel untuk menggali informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan penelitian dilakukan secara fleksibel untuk memberikan ruang kepada informan dalam menyampaikan pengalaman, pandangan, serta interpretasi mereka mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di

sekolah. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh data yang bersifat mendalam (in-depth) mengenai pengalaman langsung para aktor sekolah dalam menjalankan kebijakan inklusif, serta dinamika sosial yang terjadi dalam proses tersebut.

#### **1.8.5.3 Dokumentasi dan Studi Kepustakaan**

Dokumentasi dan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat data primer. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen internal sekolah terkait kebijakan penerimaan siswa, data jumlah siswa disabilitas, arsip kegiatan sekolah, serta foto dan catatan lapangan selama penelitian berlangsung. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber akademik seperti buku, jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan tentang pendidikan inklusif, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoretis sekaligus memperkuat analisis terhadap temuan lapangan.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab agar mempermudah pembaca dalam memahami alur pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya kajian mengenai implementasi pendidikan inklusif dalam penerimaan siswa disabilitas di sekolah menengah atas. Selain itu, bab ini juga memuat permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

## **Bab II Konteks Sosial SMA Negeri 76 Jakarta**

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu SMA Negeri 76 Jakarta. Pembahasan dalam bab ini meliputi profil sekolah, kondisi fisik dan sarana prasarana sekolah, serta karakteristik peserta didik. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi sosial dan lingkungan sekolah sebagai konteks pelaksanaan pendidikan inklusif.

## **Bab III Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Penerimaan Siswa Disabilitas**

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di SMA Negeri 76 Jakarta, khususnya dalam proses penerimaan siswa disabilitas. Pembahasan mencakup kebijakan pendidikan inklusif, mekanisme penerimaan siswa disabilitas melalui jalur PPDB afirmasi, proses pembelajaran di kelas, interaksi sosial antara siswa disabilitas dan non-disabilitas, serta bentuk stigma yang dialami oleh siswa disabilitas di lingkungan sekolah.

## **Bab IV Analisis Implementasi Pendidikan Inklusif dan Stigma Sosial**

Bab ini berisi analisis mendalam terhadap temuan penelitian dengan menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, khususnya teori stigma dari Erving Goffman. Dalam bab ini dibahas bagaimana proses penerimaan siswa disabilitas berlangsung, dinamika interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah, serta bentuk-bentuk stigma yang dialami oleh siswa disabilitas dalam sistem pendidikan inklusif.

## **Bab V Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak sekolah, pemerintah, maupun peneliti selanjutnya terkait pengembangan pendidikan inklusif bagi siswa disabilitas.